



Judul : Narasi Keagamaan sebagai Propoganda Radikalisme
Tanggal : Selasa, 23 Maret 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Narasi Keagamaan sebagai Propaganda Radikalisme

NARASI keagamaan hingga saat ini masih menjadi isu propaganda utama yang kerap digunakan jaringan kelompok teroris internasional untuk membenarkan tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang berujung pada kegiatan terorisme. Sebagai bentuk pencegahan terpaparnya masyarakat terhadap paham radikalisme tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendorong pemuka agama untuk mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat.

“Sehingga segala bentuk penyampaian propaganda, narasi-narasi yang disampaikan kelompok jaringan teroris secara global maupun domestik, dapat dilakukan *counter* secara bersama-sama,” ungkap Kepala BNPT Boy Rafli Amar saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, kemarin.

Menurut Boy, terorisme bukanlah kegiatan agama. Tidak ada satu pun agama yang membenarkan aksi terorisme. Terorisme merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi secara bersama-sama. Ketokohan para pemuka agama dapat dijadikan pintu untuk memberikan pemahaman yang jernih kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terprovokasi oleh paham radikalisme.

Boy mengatakan kelompok jaringan terorisme yang terafiliasi dengan kelompok terorisme internasional se-

perti Al-Qaeda dan IS banyak menggunakan narasi-narasi teks keagamaan untuk memperluas paham radikal mereka. Sejauh ini, BNPT telah melakukan kerja sama dengan ormas Islam dan keagamaan lainnya dalam gugus tugas yang dibentuk sejak 2020 lalu untuk turut serta melakukan pencegahan paham radikalisme ke masyarakat.

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani menyebut saat ini berkembang terminologi moderasi beragama yang dinilai merupakan terminologi yang baik dalam melakukan kontraradikalisme berbasis agama. “Saya berharap BNPT juga menggunakan terminologi ini daripada paham radikal dalam beragama. Kalau istilah ini lebih dipopulerkan, dapat bisa diterima oleh berbagai kalangan.”

Dalam RDP itu, penggunaan istilah ekstremisme oleh BNPT dikritik salah satu anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Romo HR Muhammad Syafi atau yang akrab disapa Romo. Romo pun mempertanyakan asal mula penggunaan istilah ekstremisme pada perpres serta rencana aksi BNPT. “Ekstremisme ini sesuatu makhluk baru yang berdiri sendiri yang lahirnya tidak lewat kajian antara pemerintah dan rakyat, dalam hal ini direpresentasikan oleh DPR RI, sehingga dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan ada multitafsir,” ujar Romo. (Uta/Tri/Ant/P-1)